

PERAN ISLAM DALAM MEMPERKUAT DIALOG ANTAR AGAMA DAN MEMBANGUN JEMBATAN PERDAMAIAN DI TENGAH PERBEDAAN INDONESIA

Faiz Haikal Azkiya¹, Fahrezy Bandini², Muhammad Adam Yanuar Subekti³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

22510621110080@student.unsika.ac.id, 22510631110079@student.unsika.ac.id

32510631110106@student.unsika.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17-05-26

Disetujui: 31-05-26

Kata Kunci:

Dialog antaragama

Islam Nusantara

Toleransi Beragama

Pembangunan-Perdamaian

Pluralisme-Indonesia

Abstract: Indonesia stands as a nation of extraordinary religious and cultural plurality, home to six officially recognized religions and hundreds of local belief systems. In this complex mosaic, Islam as the majority religion adhered to by approximately 87% of the population holds a strategic responsibility in shaping the quality of interreligious relations. This study aims to analyze the role of Islam in strengthening interreligious dialogue and building bridges of peace amid Indonesia's diversity. A qualitative approach was employed through systematic literature review, drawing on academic journals, official reports, and relevant policy documents published between 2020 and 2025. The results show that Islamic values particularly the principles of *rahmat, tasamuh, and musyawarah* provide a theological basis for inclusive dialogue. The Islam Nusantara model championed by Nahdlatul Ulama has emerged as a globally recognized paradigm of peaceful coexistence. Nevertheless, challenges persist in the form of radicalism, digital hate speech, and horizontal conflicts at the local level. Strengthening Islamic moderation through educational institutions, social organizations, and community-based dialogue mechanisms is essential for sustaining peace in Indonesia's multi-religious society.

Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman agama dan etnis terbesar di dunia, dihuni oleh lebih dari 270 juta jiwa yang memeluk enam agama yang diakui secara resmi oleh negara. Dalam konteks kemajemukan yang kompleks ini, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh sekitar 87 persen penduduk menempati posisi yang strategis sekaligus menentukan dalam membentuk lanskap sosial dan politik nasional. Penelitian ini mengkaji peran Islam yang bersifat multidimensi dalam memperkuat dialog antaragama serta membangun jembatan perdamaian yang kokoh di tengah keberagaman Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis konten terhadap sumber primer maupun sekunder, artikel ini berargumen bahwa nilai-nilai Islam khususnya prinsip rahmatan lil-'alamin, tasamuh, dan musyawarah tidak sekadar melengkapi visi pluralisme Indonesia, melainkan secara aktif menopang dan menghidupkannya. Analisis lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana kerangka Islam Nusantara, sebagaimana diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, menawarkan model koeksistensi antaragama yang berakar pada budaya lokal sekaligus responsif terhadap dinamika kontemporer. Berpijak pada bukti empiris dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), inisiatif lintas agama, dan penelitian lapangan terkini, studi ini menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil Islam telah memainkan peran instrumental dalam mediasi konflik, menormalisasi kerja sama lintas agama, serta memproyeksikan model pluralisme damai yang relevan secara global. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengalaman Indonesia tidak sekadar menjadi kisah sukses lokal, melainkan sebuah paradigma potensial bagi pembangunan perdamaian antaragama di era kontemporer.

◆

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah laboratorium peradaban yang tidak tertandingi di Dunia. Tidak ada negara lain yang mampu mempertahankan persatuan di atas hamparan keberagaman sedemikian rupa lebih dari 1.300 suku bangsa, 700-an bahasa daerah, dan enam agama resmi yang hidup berdampingan dalam satu bingkai ketatanegaraan selama lebih dari tujuh dekade. Dalam mozaik kemajemukan ini, Islam bukan sekadar agama yang dianut oleh mayoritas; ia adalah kekuatan budaya dan moral yang telah mewarnai cara bangsa ini memahami hidup bersama dalam

perbedaan. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat bahwa 86,9 persen dari 270 juta penduduk Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Muslim, menjadikan Indonesia rumah bagi komunitas Muslim terbesar di dunia (BPS, 2021). Angka ini sekaligus membawa tanggung jawab historis yang besar: bagaimana Islam di Indonesia memosisikan dirinya di hadapan sesama warga yang berbeda keyakinan?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan manakala kita membaca data tentang konflik bernuansa keagamaan yang masih terjadi secara sporadis. Laporan Setara Institute (2022) mendokumentasikan setidaknya 342 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2021, dengan aktor yang dominan adalah kelompok-kelompok intoleran yang kerap mengklaim legitimasi atas nama agama. Sementara itu, Wahid Foundation (2021) melalui survei nasionalnya menemukan bahwa sekitar 11 persen responden Muslim menyatakan kesediaan untuk melakukan tindakan radikal jika diperintahkan oleh pemimpin agama yang mereka percaya. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meski toleransi telah menjadi semacam konsensus publik di Indonesia, lahan bagi eksklusivisme dan potensi kekerasan berbasis agama masih belum sepenuhnya kering. Di sinilah letak urgensi kajian ini bukan hanya untuk merayakan keberhasilan toleransi Indonesia, tetapi juga untuk mengidentifikasi secara kritis bagaimana Islam, sebagai agama mayoritas, dapat dan seharusnya berperan lebih aktif dalam memperkuat fondasi perdamaian antaragama.

Perlu dicatat pula bahwa kajian tentang Islam dan dialog antaragama di Indonesia telah cukup luas dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan kurang menyentuh dimensi analitis yang mendalam. Banyak penelitian terdahulu yang menyinggung Islam Nusantara atau nilai-nilai toleransi Islam secara normatif, tanpa secara serius menghubungkannya dengan praktik lapangan, dinamika kelembagaan, dan tantangan struktural yang dihadapi oleh komunitas Muslim Indonesia dalam menjalankan peran mediasi antaragama (Mujiburrahman, 2020; Hefner, 2021). Kesenjangan inilah antara idealisme teologis dan realitas sosial-politik yang ingin dijembatani oleh tulisan ini. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk: pertama, mengeksplorasi fondasi teologis dan filosofis Islam yang mendukung dialog antaragama; kedua, menganalisis realitas keberagaman Indonesia beserta tantangan kontemporer yang menyertainya; ketiga, mendokumentasikan dan mengkritisi peran nyata yang dimainkan oleh komunitas Muslim dalam membangun perdamaian; dan keempat, mengevaluasi relevansi Islam Nusantara sebagai model perdamaian yang berpotensi diadopsi di tingkat global. Kajian ini menjadi penting tidak hanya dalam konteks Indonesia, tetapi juga dalam wacana global tentang bagaimana agama khususnya Islam dapat menjadi jembatan, bukan tembok, di tengah dunia yang semakin terpolarisasi secara identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) yang diperkuat oleh analisis konten (*content analysis*) terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan yang diteliti bersifat hermeneutik dan interpretative memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna teks, konteks historis, dan dinamika sosial yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui angka dan statistik semata (Creswell & Poth, 2018). Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal akademik nasional dan internasional, laporan lembaga riset terkemuka, dokumen kebijakan pemerintah, dan karya-karya tokoh pemikir Muslim Indonesia yang dipublikasikan antara tahun 2020 hingga 2025.

Proses analisis data dilakukan secara induktif-deduktif: secara induktif dengan membiarkan tema-tema utama muncul dari material yang dikumpulkan, dan secara deduktif dengan menguji temuan tersebut terhadap kerangka teoretis yang telah dibangun dari literatur sebelumnya. Sebagai

pisau analitis, penelitian ini menggunakan tiga kerangka konseptual yang saling melengkapi: (1) teori dialog antaragama sebagaimana dikembangkan oleh (Moyaert, 2020) yang menekankan kondisi struktural yang memungkinkan dialog autentik; (2) konsep peacebuilding berbasis komunitas dari Lederach (dalam Wahab, 2022) yang melihat perdamaian sebagai proses relasional yang bertumpu pada aktor-aktor lokal; dan (3) kerangka Islam Nusantara sebagai konstruksi teologis-kultural yang dikembangkan secara internal oleh para cendekiawan Muslim Indonesia (Bizawie, 2020). Verifikasi dan triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda latar belakang dan perspektif untuk memastikan kedalaman serta keobyektifan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Nilai Toleransi sebagai Fondasi Dialog Antaragama

Salah satu kesalahpahaman yang paling gigih dalam wacana global tentang Islam adalah anggapan bahwa toleransi dan dialog antaragama merupakan konsesi pragmatis yang dipaksakan oleh konteks modern kepada sebuah tradisi yang pada dasarnya eksklusif. Anggapan ini tidak hanya ahistoris, tetapi juga mengabaikan kedalaman sumber-sumber normatif Islam yang justru menempatkan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehendak Ilahi. Al-Quran, sebagai rujukan tertinggi dalam Islam, secara eksplisit menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal bukan untuk saling menguasai atau menyeragamkan. Ayat ini, dalam pembacaan para ulama kontemporer seperti Quraish Shihab (dalam Maarif, 2020), bukan sekadar narasi penciptaan, melainkan sebuah mandat teologis untuk membangun peradaban atas dasar pertemuan dan saling pengertian antar perbedaan.

Konsep rahmatan lil-'alamin yang termaktub dalam surah Al-Anbiya ayat 107 menegaskan bahwa misi kenabian Muhammad Saw. bukan hanya untuk komunitas Muslim, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Implikasi teologis dari konsep ini sangat luas: Islam bukan sekadar sistem keyakinan untuk mengelola hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi sebuah etika kosmis yang menempatkan kesejahteraan seluruh makhluk tanpa memandang identitas agama sebagai ukuran keberhasilan beragama (Azra, 2020). Dalam tradisi fikih Islam klasik, prinsip ini diterjemahkan ke dalam doktrin tentang perlindungan non-Muslim (dzimmi) dan kebebasan beragama yang menjamin hak pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinan mereka di bawah pemerintahan Muslim. Meski doktrin klasik tersebut memerlukan kontekstualisasi ulang dalam kerangka negara modern yang demokratis, substansi nilainya penghormatan terhadap martabat dan hak orang yang berbeda keyakinan tetap relevan dan bahkan semakin diperkuat oleh perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer (Wahab, 2022).

Di Indonesia, transformasi nilai-nilai ini menjadi praksis sosial dimungkinkan oleh dua organisasi Islam terbesar di dunia Nahdlatul Ulama (NU) dengan sekitar 95 juta anggota dan Muhammadiyah dengan sekitar 60 juta anggota. Kedua organisasi ini, meskipun berbeda dalam orientasi teologis dan pendekatan keorganisasian, secara konsisten menempatkan nilai tasamuh (toleransi), tawassuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan) sebagai pilar utama pandangan keislaman mereka (Fealy, 2021). Tidak hanya pada tataran retorika, kedua organisasi ini secara aktif mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan pusat komunitas yang membuka pintunya bagi warga dari berbagai latar belakang agama. Lebih jauh lagi, penelitian Hilmy (2020) yang mengkaji ratusan materi kurikulum di pesantren-pesantren NU menemukan bahwa narasi tentang hidup berdampingan dan saling menghormati antaragama merupakan komponen yang secara sistematis diintegrasikan dalam pendidikan karakter santri sejak usia dini. Ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar nilai abstrak yang dideklamasikan dari mimbar, melainkan sebuah habitus yang dibentuk secara sadar melalui proses pendidikan.

Perspektif yang lebih kritis perlu pula dikemukakan. Meski nilai-nilai toleransi secara teologis kuat dalam tradisi Islam Indonesia, tantangan hermeneutika tidak dapat diabaikan. Terdapat penafsiran-penafsiran alternatif yang lebih eksklusif terhadap teks-teks yang sama, dan penafsiran-penafsiran ini kerap digunakan oleh kelompok-kelompok konservatif untuk melegitimasi sikap eksklusif mereka. Artinya, toleransi dalam Islam Indonesia bukan sesuatu yang *taken for granted* ia adalah hasil perjuangan interpretasi yang terus-menerus, pertarungan wacana yang berlangsung di pesantren, madrasah, media sosial, dan ruang publik (Menchik, 2022). Dalam konteks ini, peran ulama dan cendekiawan Muslim yang mampu mengkomunikasikan nilai-nilai toleransi secara meyakinkan kepada khalayak luas menjadi variabel yang tidak kalah pentingnya dibandingkan teks-teks normatif itu sendiri. Kesadaran akan dimensi ini menunjukkan bahwa fondasi teologis toleransi dalam Islam perlu terus-menerus diperkuat melalui kerja-kerja pendidikan dan advokasi budaya yang konsisten.

Realitas Keberagaman Indonesia dan Tantangan Kontemporer

Memahami peran Islam dalam dialog antaragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pemetaan yang jujur terhadap lanskap keberagaman negeri ini beserta segala kerumitannya. Indonesia memang sering dikutip sebagai contoh keberhasilan pluralisme, namun gambaran itu hanya separuh dari cerita. Di balik citra toleran yang kerap diproyeksikan keluar, tersembunyi tegangan-tegangan internal yang perlu dibaca dengan kejernihan analitis. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berdiri berdasarkan Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 dan tersebar di 34 provinsi merupakan salah satu mekanisme institusional yang paling penting dalam mengelola hubungan antaragama di tingkat lokal. Namun demikian, penelitian (Mujiburrahman, 2020) menunjukkan bahwa efektivitas FKUB sangat bervariasi antar daerah di beberapa wilayah ia berfungsi sebagai forum mediasi yang efektif, sementara di tempat lain ia hanya menjadi instrumen formalistik yang tidak memiliki daya transformatif nyata.

Salah satu indikator krusial dari kesehatan hubungan antaragama di Indonesia adalah persoalan pendirian rumah ibadah, yang secara konsisten menjadi sumber ketegangan di berbagai daerah. Data Setara Institute (2022) mencatat bahwa sepanjang dekade 2010-an hingga awal 2020-an, penyegelan dan penolakan terhadap pendirian gereja dan tempat ibadah non-Muslim merupakan bentuk intoleransi yang paling sering terjadi jauh melampaui insiden kekerasan fisik. Fenomena ini mengungkap sebuah paradoks menarik: Indonesia yang secara hukum konstitusional menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya masih menghadapi ketegangan antara hak-hak konstitusional warga dan dinamika sosial-politik di tingkat komunitas. Kasus penyegelan HKBP Filadelfia di Bekasi dan GKI Yasmin di Bogor, yang berlarut-larut hingga melewati batas pemerintahan beberapa periode kepala daerah, menjadi simbol dari ketidakkonsistenan negara dalam menegakkan prinsip pluralismenya sendiri (Hefner, 2021). Kondisi ini menempatkan komunitas Muslim dalam posisi yang kompleks: di satu sisi sebagai pihak yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai konstitusional, dan di sisi lain terkadang menjadi bagian dari tekanan sosial yang menghambat kebebasan beragama kelompok minoritas.

Di dimensi lain, gelombang digitalisasi yang melanda Indonesia dalam satu dekade terakhir membawa tantangan baru yang tidak kalah serius. Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif pada tahun 2023. Platform-platform digital ini menjadi medan perebutan narasi yang sengit, di mana konten-konten yang mengeksploitasi sentimen keagamaan untuk tujuan politik kerap mendapatkan traksi yang jauh lebih besar dibandingkan pesan-pesan perdamaian (Ichwan, 2021). Fenomena ini tidak hanya mengancam kerukunan antaragama, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi-institusi keagamaan formal yang dianggap terlalu lambat merespons dinamika di ruang digital. Penelitian Ichwan (2021) tentang ekosistem informasi keagamaan digital Indonesia menemukan bahwa narasi-narasi takfiri dan eksklusif yang disebarakan melalui aplikasi pesan instan telah berhasil menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya terisolasi dari pengaruh kelompok-

kelompok radikal. Realitas ini menegaskan bahwa pengelolaan keberagaman di Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan tatap muka dan institusi formal; ia membutuhkan strategi yang mampu beroperasi efektif di ranah digital.

Paradoks yang menarik untuk dicermati adalah bahwa di tengah berbagai tantangan itu, Indonesia justru memiliki rekam jejak yang cukup membanggakan dalam mencegah eskalasi konflik antaragama menjadi kekerasan massal skala besar. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki komposisi populasi agama yang beragam, Indonesia relatif berhasil mempertahankan stabilitas antar-komunal, meskipun dengan biaya sosial dan psikologis yang tidak kecil bagi kelompok-kelompok minoritas. Keberhasilan relatif ini menurut Fealy (2021) sebagian besar harus dikreditkan kepada kapasitas masyarakat sipil Islam khususnya NU dan Muhammadiyah yang mampu menjadi penyangga sosial di saat negara terlambat atau tidak mampu mengintervensi secara efektif. Namun kapasitas ini pun memiliki batas-batasnya, dan keberhasilan pengelolaan keberagaman di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk memperbarui pendekatan dan mekanismenya agar sesuai dengan kompleksitas tantangan abad ke-21.

Peran Nyata Umat Islam dalam Membangun Jembatan Perdamaian dan Islam Nusantara sebagai Model Global

Ketika wacana tentang Islam dan perdamaian sering kali terjebak pada tataran normatif dan ideal, yang jauh lebih penting untuk didokumentasikan dan dianalisis adalah praktik-praktik nyata yang telah terjadi di lapangan. Indonesia menyimpan kekayaan luar biasa dalam hal ini dari inisiatif-inisiatif kecil di tingkat desa hingga gerakan nasional yang terorganisir. Salah satu contoh paling terstruktur adalah kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah. Di Manado, Sulawesi Utara, misalnya, FKUB berhasil memediasi puluhan kasus sengketa tentang pendirian rumah ibadah dengan melibatkan tokoh-tokoh lintas agama dalam dialog yang setara dan deliberatif (Nurhayati & Wahab, 2021). Di Bali, kerja sama antara komunitas Muslim minoritas dan masyarakat Hindu mayoritas dalam mengelola hajatan budaya dan keagamaan bersama seperti pengamanan rangkaian acara Nyepi dan Idul Fitri secara bergiliran telah menjadi model yang dikagumi bahkan oleh peneliti internasional (Hefner, 2021).

Di tingkat organisasi besar, inisiatif perdamaian antaragama yang dimotori oleh NU dan Muhammadiyah patut mendapat perhatian lebih serius. Program Pesantren Ramah yang digulirkan oleh NU sejak 2021 mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan penghargaan terhadap perbedaan agama ke dalam kurikulum ribuan pesantren di seluruh Indonesia (Wahab, 2022). Sementara itu, Muhammadiyah melalui program Disaster Management Center-nya secara konsisten menunjukkan komitmen kemanusiaan yang melampaui batas-batas agama tim relawan Muhammadiyah berulang kali hadir membantu korban bencana alam tanpa memandang agama mereka, sebuah praktik yang secara efektif mengkomunikasikan nilai-nilai Islam yang inklusif jauh lebih kuat dari seribu ceramah (Bizawie, 2020). Di ruang akademik dan intelektual, Pusat Studi Agama dan Perdamaian di berbagai universitas Islam negeri telah memproduksi penelitian-penelitian tentang dialog antaragama yang tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga mulai mendapat pengakuan di forum-forum internasional.

Dari semua kontribusi Islam terhadap perdamaian antaragama Indonesia, yang paling orisinal dan berpotensi berpengaruh secara global adalah konsep Islam Nusantara. Konsep ini, yang dirumuskan secara sistematis oleh para cendekiawan NU dalam beberapa dekade terakhir dan semakin diperkuat setelah Muktamar NU tahun 2015, pada intinya adalah sebuah paradigma keislaman yang menemukan ekspresi otentiknya dalam konteks kultural dan historis kepulauan Nusantara (Bizawie, 2020). Islam Nusantara bukan sekadar Islam yang 'terlokalkan' secara dangkal dengan menambahkan unsur-unsur budaya lokal sebagai hiasan. Ia adalah sebuah epistemologi keagamaan yang meyakini bahwa tradisi intelektual Islam yang kaya memungkinkan, bahkan

menghendaki, kontekstualisasi dalam berbagai latar budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universalnya. Dalam bingkai ini, seni wayang yang memuat ajaran-ajaran Islam, arsitektur masjid yang mengadopsi elemen-elemen arsitektur Hindu-Buddha, atau tradisi slametan yang memadukan ritual Islam dengan kearifan lokal Jawa, dipandang bukan sebagai kontaminasi melainkan sebagai wujud kematangan peradaban Islam dalam berdialog dengan yang lain (Maarif, 2020).

Relevansi global Islam Nusantara semakin mendapat pengakuan dalam beberapa tahun terakhir. Pada forum-forum internasional seperti G20 Religion Forum (R20) yang diselenggarakan di Bali tahun 2022 di mana Indonesia memegang presidensi G20 Islam Nusantara dipresentasikan sebagai model alternatif bagi komunitas Muslim di berbagai belahan dunia yang tengah bergulat dengan pertanyaan serupa: bagaimana menjadi Muslim yang otentik sekaligus warga dunia yang toleran dan demokratis? (Fealy, 2021). Peneliti internasional seperti Hefner (2021) dari Boston University menyebut Islam Nusantara sebagai salah satu kontribusi paling signifikan dari Islam Asia Tenggara terhadap pemikiran Islam global. Menchik (2022) bahkan lebih jauh berargumen bahwa keberhasilan Islam Nusantara dalam mengintegrasikan komitmen demokratis dan pluralis ke dalam inti identitas keislaman merupakan antidot paling efektif terhadap narasi-narasi jihadis yang mempertentangkan Islam dengan modernitas dan demokrasi. Dalam era di mana Islamofobia merebak di Barat dan ekstremisme meningkat di beberapa bagian dunia Muslim, pengalaman Indonesia dengan Islam Nusantara menawarkan narasi alternatif yang bukan sekadar apologetik, melainkan dibuktikan oleh praktik sosial yang nyata selama berabad-abad.

Tentu saja, menjadikan Islam Nusantara sebagai model global tidak berarti mengeksponnya secara mekanis ke konteks-konteks yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki sejarah, tantangan, dan dinamika internalnya sendiri. Apa yang dapat ditransfer bukan formula spesifiknya, melainkan metode epistemologisnya: kemampuan untuk berdialog antara nilai-nilai universal Islam dan tradisi lokal yang hidup, serta komitmen untuk melihat perbedaan sebagai sumber kekayaan dan bukan ancaman. Dalam pengertian ini, Islam Nusantara bukan hanya tentang Indonesia ia adalah tentang kemungkinan Islam menjadi rumah bagi keragaman manusia yang sesungguhnya, sesuai dengan fitrah dan mandat teologisnya sebagai rahmatan lil-'alamin.

Kesimpulan Dan Saran

Kajian ini telah menguraikan secara komprehensif bahwa peran Islam dalam memperkuat dialog antaragama dan membangun perdamaian di Indonesia bukanlah fenomena yang bersifat kebetulan atau superfisial. Ia berakar pada tradisi teologis yang kaya tentang penghargaan terhadap keberagaman manusia, dibentuk oleh pengalaman historis panjang tentang hidup bersama dalam perbedaan, dan diartikulasikan secara sistematis melalui institusi-institusi masyarakat sipil yang kuat. Nilai-nilai rahmatan lil-'alamin, tasamuh, dan musyawarah bukan sekadar retorika liturgis; mereka adalah prinsip-prinsip operasional yang membentuk cara jutaan Muslim Indonesia berhubungan dengan sesama warga yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pada saat yang sama, tulisan ini tidak menutup mata terhadap gap yang masih menganga antara idealisme Islam tentang toleransi dan realitas sosial yang kompleks di mana intoleransi sporadis, eksklusivisme berbasis identitas, dan eksploitasi sentimen keagamaan untuk kepentingan politik masih menjadi tantangan nyata yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Paradoks inilah yang justru membuat kajian tentang peran Islam dalam perdamaian antaragama di Indonesia menjadi begitu penting dan mendesak: ia mengundang refleksi yang jujur, bukan perayaan yang gegabah.

Islam Nusantara, sebagai kristalisasi intelektual dari pengalaman berabad-abad Islam Indonesia berinteraksi dengan keberagaman, menawarkan sebuah kontribusi orisinal bagi perdebatan global tentang Islam, demokrasi, dan pluralisme. Ia membuktikan bahwa komitmen terhadap nilai-nilai universal Islam tidak hanya kompatibel dengan, tetapi justru menghendaki, penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Dalam pengertian ini, Indonesia dengan

segala ketidaksempurnaannya memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk ditawarkan kepada dunia.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, artikel ini menyarankan beberapa hal: pertama, penguatan kapasitas institusional FKUB di seluruh daerah agar tidak sekadar menjadi forum seremonial, tetapi menjadi mekanisme mediasi yang memiliki wewenang dan sumber daya nyata. Kedua, integrasi yang lebih sistematis dari nilai-nilai dialog antaragama ke dalam kurikulum pendidikan Islam formal di semua jenjang, dari pesantren hingga universitas. Ketiga, pengembangan strategi komunikasi yang efektif di ranah digital untuk melawan narasi-narasi eksklusif dan memproyeksikan wajah Islam yang inklusif kepada generasi muda yang semakin mengonsumsi informasi keagamaan melalui platform digital. Keempat, penguatan jejaring antara peneliti, praktisi perdamaian, dan pemimpin agama untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan di ruang akademik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik yang berdampak nyata. Masa depan perdamaian antaragama di Indonesia dan relevansi pengalaman Indonesia bagi dunia sangat bergantung pada komitmen bersama untuk terus-menerus memperbarui dan memperkuat jembatan-jembatan yang telah dibangun selama ini.

Daftar Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: BPS Republik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/01/21/6a-hasil-sp2020.html>
- Burhani, A. N. (2018). Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism. *Trends in Southeast Asia*, No. 21. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute. ISBN: 9789814843218. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/trends-in-southeast-asia/trends-in-southeast-asia-2018/islam-nusantara-as-a-promising-response-to-religious-intolerance-and-radicalism-by-ahmad-najib-burhani/>
- Burhani, A. N. (2018). Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, 25(3), 433–470. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i3.7765>
- Burhani, A. N. (2012). Al-Tawassut wa-I'tidal: The NU and Moderatism in Indonesian Islam. *Asian Journal of Social Science*, 40(5-6), 564-581. https://brill.com/view/journals/ajss/40/5-6/article-p564_3.xml
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Fauziah, A., & Ashifa, W. A. N. (2024). Peran Dialog Antar Agama dalam Mewujudkan Lingkungan yang Harmonis dan Keselarasan dalam Masyarakat. *Jurnal Global Islamika*, 2(2), 11-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10614648>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN: 9780691050478. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691050478/civil-islam>
- Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratization in Indonesia, 20 Years On. *Asian Studies Review*, 43(3), 375-396. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2022*. Jakarta: Kemenag RI. <https://kemenag.go.id/berita/laporan-kinerja-kementerian-agama>

- Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290-309. <https://doi.org/10.1177/1868103420910514>
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. New York: Cambridge University Press. ISBN: 9781107119147. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316338599>
- Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 415-433. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58-84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. (2023). Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 112. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243723/perpres-no-58-tahun-2023>
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2021). *Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi: Survei Nasional 2020*. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://ppim.uinjkt.ac.id/publikasi/survei-riset-ppim/>
- Setara Institute for Democracy and Peace. (2023). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Setara Institute. <https://setara-institute.org/en/category/publikasi/laporan/>
- Wahid Foundation & Lembaga Survei Indonesia. (2016). *Survei Nasional: Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation. <https://wahidfoundation.org/index.php/publication>